

KETAHANAN PANGAN SEBAGAI KONDISI TERPENUHINYA PANGAN BAGI RUMAH TANGGA

NATELDA R. TIMISELA DAN FEBBY J. POLNAYA

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

ABSTRAK

Pangan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diperuntukkan sebagai bahan makanan atau minuman bagi konsumsi manusia; termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan serta minuman. Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Fenomena ketahanan pangan ditandai oleh tingginya potensi keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan disatu sisi, tetapi disisi lain realitas kekurangan pangan dan gizi pada tingkat rumah tangga signifikan terjadi. Dibalik fenomena ini, realitas makro tentang tingginya ketahanan pangan dalam arti ketersediaan dan distribusi pada berbagai wilayah, juga banyak tidak konsisten dengan realitas mikro dalam arti banyaknya rumah tangga yang kurang gizi pada wilayah tersebut. Secara konseptual, fenomena ini menuntut perlunya pendefinisian ketahanan pangan yang difokuskan pada makna “kemampuan anggota rumah tangga mengakses pangan sampai ke mulut”.

Kata Kunci : Ketahanan pangan, Pangan, Rumah tangga

PENDAHULUAN

Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), karena pangan selain mempunyai arti biologis juga mempunyai arti ekonomis dan politis. Implikasinya bahwa penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan jumlah, keamanan dan mutu gizi yang memadai harus terjamin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat sesuai pola makan dan keinginan mereka agar hidup sehat dan aktif (Sinulingga, 2003).

Ketahanan pangan akan terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui penganeekaragaman pangan, yaitu proses pengembangan produk pangan yang tidak tergantung pada satu jenis bahan saja, tetapi memanfaatkan bermacam-macam bahan pangan. Pengembangan tersebut mencakup aspek produksi, distribusi hingga konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Berbagai pangan yang tersedia terutama ditentukan oleh produksi pangan dan perkembangan teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan produksi pangan yang beranekaragam. Adanya kesadaran dari masyarakat mengenai konsumsi pangan yang seimbang dan kemampuan daya beli untuk mengakses pangan akan mendorong keberhasilan penganeekaragaman pangan.

Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi sekitar 215 juta jiwa dan terus terjadi peningkatan 1,6% per tahun serta pesatnya perkembangan informasi global mendorong perlunya ketersediaan bahan pangan nasional yang cukup besar dan semakin beragam. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional maka kebutuhan pangan yang meningkat harus diupayakan dan terpenuhi dari produksi dalam negeri.

KETAHANAN PANGAN SEBAGAI KONDISI TERPENUHINYA PANGAN DALAM RUMAH TANGGA

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia dan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan

nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, dimana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri (Krisnamurthi, 2003).

Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengembangan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena : 1) pangan dan gizi seimbang merupakan pemenuhan kebutuhan dasar pangan yang paling asasi bagi manusia; 2) keberhasilan proses pembentukan sumberdaya manusia terletak pada keberhasilan pemenuhan kecukupan pangan dan perbaikan pola konsumsi; 3) unsur strategis dalam pembangunan ekonomi.

Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas pengadaannya. Disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan, ketahanan pangan mengisyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau.

Program ini dikembangkan dengan beberapa justifikasi pokok antara lain: 1) sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani baik sebagai produsen maupun konsumen pangan yang relatif miskin; 2) jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sebaiknya penyediaan bahan pangan nasional tidak hanya digantungkan dari satu komoditi saja ataupun dari luar negeri; 3) kerawanan pangan merupakan pemicu instabilitas politik dan ekonomi bila terjadi kekurangan produksi (Uluputty, 2006).

Fenomena ketahanan pangan di Indonesia ditandai oleh tingginya potensi keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan di satu sisi, tetapi di sisi lain realitas kekurangan pangan dan gizi pada tingkat rumah tangga signifikan terjadi. Di balik fenomena ini, realitas makro tentang tingginya ketahanan pangan dalam arti ketersediaan dan distribusi pada berbagai wilayah, juga tidak konsisten dengan realitas mikro dalam arti banyaknya rumah tangga yang kurang gizi pada wilayah tersebut.

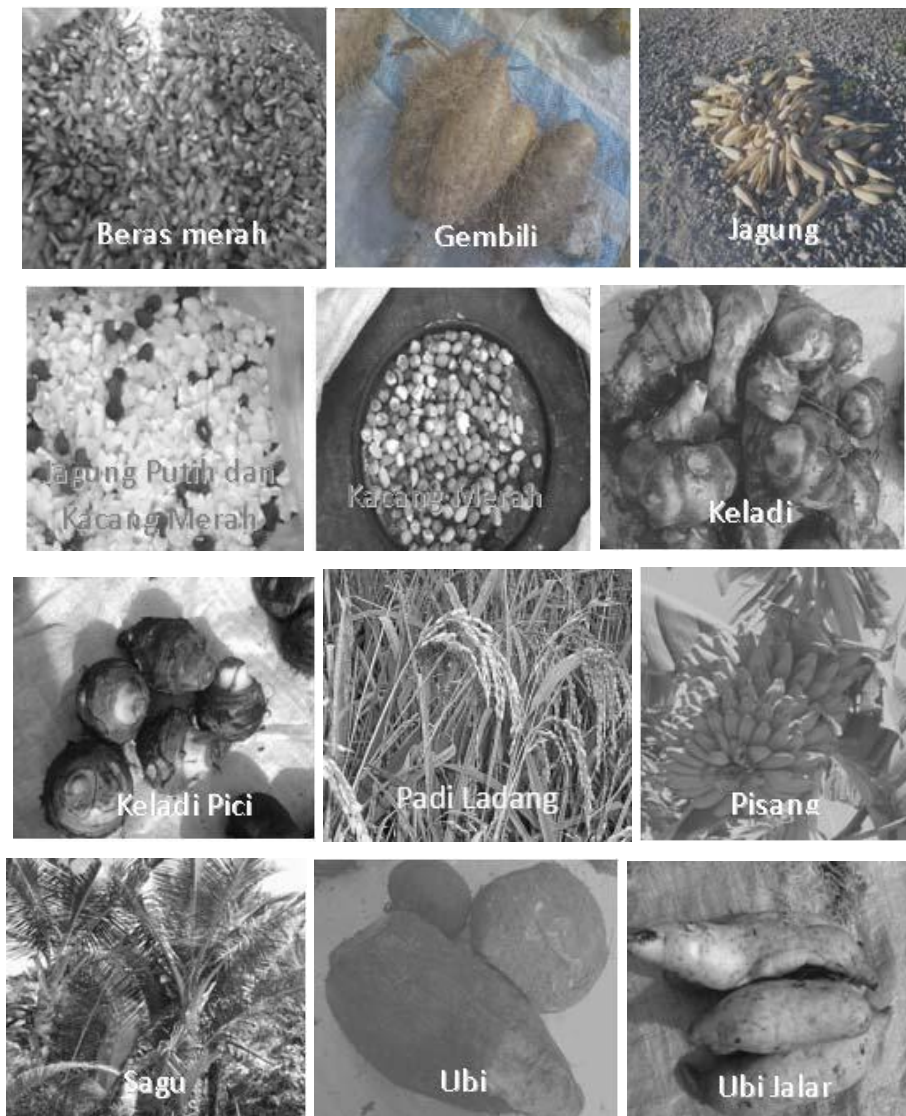
Secara konseptual, fenomena ini menuntut perlunya pendefinisian ketahanan pangan yang difokuskan pada makna “kemampuan anggota rumah tangga mengakses pangan sampai ke mulut”. Perumusan kebijakan, implementasi program, dan pengembangan kajian/penelitian dalam bidang ketahanan pangan idealnya pertama-tama diletakkan pada fokus definisi yang demikian (Thaha, 2007).

Untuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan sumber hayati bagi ketahanan pangan dalam makna “kemampuan anggota rumah tangga mengakses pangan sampai ke mulut”, diperlukan pengelolaan pengetahuan yang holistik, baik dalam arti mengkonsolidasikan hasil-hasil penelitian yang sudah ada, menjalankan penelitian untuk substansi masalah yang pengetahuan tentang masalah tersebut masih terbatas.

PANGAN-PANGAN LOKAL DI KEPULAUAN MALUKU

Pangan lokal di Kepulauan Maluku dapat ditemui dalam bentuk pangan “mentah” yang belum diolah, maupun pangan hasil olahan. Bentuk yang pertama merupakan hasil panen yang langsung digunakan seperti produksi biji dan umbi dari tanaman-tanaman yang khas ditemukan pada agroekosistem lahan kering, sedangkan pangan hasil olahan merupakan bentuk pengolahan hasil panen dari bahan pangan “mentah” menjadi “bahan jadi” yang dapat disimpan lama. Pangan pokok berasal dari tanaman-tanaman yang ditanam dalam suatu sistem pertanian yang diusahakan petani (Tim Fakultas Pertanian, 2007).

Pangan pokok di Kepulauan Maluku beragam menurut musim panen suatu komoditas dan berbeda menurut daerah. Pangan pokok ini antara lain sagu (*Metroxylon sp*) lebih banyak ditemukan di Pulau Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, dan sebagian kecil di Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat. Pangan pokok umbi-umbian seperti Ubi Putih (*Dioscorea alata*), keladi (*Colocasia sp*), Talas (*Xanthosoma sp*), gembili (*Dioscorea esculenta*), ketela pohon (*Manihot esculenta*) dan ubi jalar (*Ipomoea batatas*); serealiala seperti padi gogo (*Oryza sativa*) dan jagung (*Zea mays*); Kacang-kacangan seperti kacang tanah (*Arachis hypogaea*), kacang hijau (*Vigna radiata*), kedelai (*Glycine max*), kacang merah, dan jenis kacang lainnya yang lebih banyak dijumpai di Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat karena merupakan pangan utama bagi masyarakat setempat. Pisang (*Musa sp*) seperti pisang tanduk, pisang abu-abu, pisang kasta/banda, pisang raja/dewaka dan pisang 40 hari, hampir dijumpai di seluruh kepulauan di Maluku.



Gambar 1. Jenis – Jenis pangan Lokal di Kepulauan Maluku (*Dokumentasi : Tim Fakultas Pertanian (2007)*)

Untuk mempertahankan hidup biasanya masyarakat mengolah pangan-pangan lokal ini untuk dijual bahkan disimpan sampai musim panen berikutnya. Hasil penelitian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, memperlihatkan bahwa umbi-umbian (ubi, gembili, patatas, dan keladi), biasanya masyarakat membuat kandang kecil-kecilan di kebun atau di rumah untuk disimpan, dan biasanya bertahan selama 6 bulan sampai satu tahun. Selain itu juga masyarakat setempat mengolah pangan seperti umbian dan pisang dengan cara perebusan atau "bakar batu" kemudian dipotong kecil lalu dikeringkan untuk disimpan dalam waktu lama, yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan "mandekar". Sementara jagung dan kacang-kacangan disimpan dalam kaleng, drum, "blong" (buah kalabasa yang kering) diikat di atas para-para untuk pengasapan sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan tetap awet. Ada pula hasil olahan parutan ketela pohon atau hasil panggur sagu yang dibakar dalam "porna" yang juga dikeringkan sehingga dapat disimpan lama yang disebut "sagu" (di Kepulauan Kei dikenal dengan sebutan "enbal") (Tim Fakultas Pertanian, 2007). Di Kepulauan Aru, pengolahan sagu basah dikenal dengan nama pong-pong, sedangkan daerah lain di kepulauan Maluku pengolahan ubi kayu dikenal sebagai "sagu kasbi" serta pengolahan pati sagu menjadi "sagu lempeng".

Komoditas yang perlu dilestarikan dan dikembangkan di Provinsi Maluku adalah sagu untuk mendukung ketahanan pangan nasional, karena merupakan salah satu komoditas unggulan. Tanaman sagu dapat dimanfaatkan hingga mencapai kurang lebih 95% dari total keseluruhan pohonnya karena bukan saja bahan pangan yang dapat dihasilkan namun berbagai produk dan bahan baku non-pangan dapat pula dihasilkan misalnya sebagai bahan bangunan, kerajinan tangan dan lain-lain. Keseluruhan produk ini harus berkualitas sehingga mampu menarik perhatian pembeli atau konsumen.

Sagu bagi orang Maluku selain sebagai pati sagu, juga diolah menjadi panganan tradisional seperti sagu lempeng, sinoli, sagu tumbu, bagea, serut, sagu mutiara dan lain sebagainya. Selain itu juga sagu sudah di produksi secara lebih modern seperti tepung sagu kering yang bisa disimpan dalam waktu lama, kue-kue sagu dan lain sebagainya, namun masih terbatas pada skala industri rumah tangga. Seperti komoditi pertanian lainnya, sagu juga memiliki kegunaan waktu dan tempat, yang jika tidak berpindah tempat/lokasi tepat waktunya, maka akan mengurangi kualitas dan menurunkan nilai serta kegunaan dari produk ini (Timisela, 2005).

HASIL EMPIRIS TENTANG KONDISI KETAHANAN PANGAN

Berusaha untuk tetap hidup merupakan tantangan bagi setiap makhluk hidup di dunia. Masyarakat akan mencukupi kebutuhan hidup rumahtangganya dengan berbagai kebutuhan pangan yang bisa diperoleh dari hasil usaha pertanian, hasil laut ataupun dapat diperoleh langsung dari pasar. Sumberdaya alam yang ada di daerah diharapkan mampu dikelola untuk menghasilkan pangan yang cukup bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat.

Namun kenyataannya, ditemukan di beberapa daerah di Kepulauan Maluku, begitu banyak sumberdaya alam yang dimiliki tetapi kemampuan untuk mengelola sangat terbatas. Selain itu juga norma kehidupan masyarakat yang telah berubah, sehingga mendorong orang untuk hidup senang, bermalasmalasan, hanya mau bekerja yang lebih mudah dan cepat mendatangkan uang. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kesejahteraan hidup belum dapat dirasakan dengan baik, karena banyak masalah yang dihadapi misalnya kesehatan yang tidak terjamin, kurang gizi dan ketidakcukupan pangan untuk diakses oleh rumahtangga secara kontinu.

Sistem pangan dan gizi masyarakat harus diprogramkan secara terarah menuju suatu tujuan utama yaitu tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai serta dapat dijangkau oleh semua orang pada setiap saat agar dapat hidup secara aktif dan sehat (Hidayat, 2002).

Pangan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai bahan makanan atau minuman bagi konsumsi manusia; termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan serta minuman.

Masyarakat di Maluku, ternyata relatif masih mempertahankan pangan lokal yang selama ini diusahakan untuk dikonsumsi. Namun seiring perkembangan kota, maka desa-desa yang berada di pinggiran kota atau yang mempunyai akses transportasi ke kota, memiliki kemudahan memperoleh “beras padi sawah” di pasar atau di toko-toko. Kemudahan ini ditunjang dengan pendapatan petani yang bersumber dari penghasilan pertanian (tanaman tahunan), hasil laut, ternak dan sumber pendapatan lainnya, serta kebijakan pemerintah dengan memberikan beras bagi masyarakat miskin. Kondisi ini ternyata sangat membantu, namun di sisi lain menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap beras yang disinyalir merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya perubahan pola konsumsi. Di lain pihak, pada desa-desa yang terpencil dan jauh dari kota, perubahan pola konsumsi berlangsung sangat lambat karena aksesibilitas (jalan, pasar, toko), sehingga masyarakat cenderung mempertahankan pola konsumsi dengan pangan lokal. Kondisi ini harus dipertahankan, mengingat bahwa di masa yang akan datang pangan spesifik lokal akan dijadikan sebagai basis ketahanan pangan di daerah Maluku secara khusus. Yang masih menjadi kendala utama adalah bagaimana masyarakat bisa mengkonsumsi pangan-pangan yang ada secara seimbang dan sempurna sehingga tidak terjadi kekurangan gizi.

Tingkat konsumsi pangan berhubungan dengan ketersediaan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat. Tingginya tingkat permintaan pangan sangat ditunjang oleh tingkat pendapatan masyarakat. Sumber pendapatan masyarakat (petani) sebagian besar bersumber dari tanaman tahunan (koli, jeruk, kelapa, jambu mete), ternak (babi, kambing, domba, ayam) dan perikanan. Pendapatan yang diperoleh dari sumber yang beragam ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses pada sumber-sumber pangan yang tersedia. Namun kenyataan membuktikan bahwa masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah sangat kesulitan untuk mengakses pangan dalam jumlah yang cukup tersedia. Hal ini menyebabkan banyak daerah-daerah terpencil di Kepulauan Maluku masih kurang gizi. Hasil penelitian oleh Tim Fakultas Pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terlihat bahwa banyak masyarakat pada daerah-daerah tersebut masih kekurangan gizi dan akses kesehatannya masih terbatas akibat infrastruktur transportasi dan aksesibilitas lainnya tidak tersedia secara kontinue.

Fakta lapangan membuktikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat di setiap desa yang berdekatan dengan pasar dan ditunjang infrastruktur jalan serta transportasi yang cukup, memiliki tingkat konsumsi pangan lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang terletak jauh dari pasar dan tidak ditunjang infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang menghubungkan suatu wilayah, maupun dalam suatu kawasan tertentu sangat penting untuk menunjang sistem perekonomian daerah, semakin baik kondisinya maka semakin baik pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi dan sosial wilayah setempat.

Tersedianya infrastruktur sebagai suatu kunci keberhasilan pembangunan, mengingat bahwa kunci keberhasilan pembangunan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat banyak. Mobilitas manusia dan barang, sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk lalu lintas informasi, aktivitas agro-ekonomi. Ketika infrastruktur tidak menunjang, secara otomatis akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, hal ini karena kegiatan ekonomi menjadi pilihan yang sangat dilematis dan mahal serta membebani masyarakat. Infrastruktur-infrastruktur yang sangat penting itu adalah transportasi, komunikasi, penerangan (listrik), pasar, kesehatan, pendidikan, air bersih dan jasa lainnya.

Tingkat kecukupan/konsumsi zat gizi dan pangan penduduk merupakan indikator penting dalam pembangunan nasional yang juga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian kesehatan dan sosial ekonomi. Salah satu pendekatan untuk melihat kondisi gizi masyarakat yaitu dari kecukupan konsumsi kalori dan protein. Konsumsi kalori dan protein yang cukup merupakan kebutuhan dasar untuk hidup sehat. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari setiap manusia membutuhkan energi yang berfungsi sebagai input bagi kegiatan produktif manusia. Tanpa energi yang cukup manusia tidak dapat bekerja secara optimal dan berpengaruh pada kesehatan yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat produktivitas. Dengan demikian perbaikan pola konsumsi penduduk khususnya makanan dalam rangka memperbaiki status gizi merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas kesehatan.

Tingkat konsumsi zat gizi khususnya untuk energi dan protein, kasus pada masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, rata-rata dibawah 100 persen. Untuk rata-rata tingkat

konsumsi energi 84 persen dan rata-rata tingkat konsumsi protein 87,7 persen (Tabel 1). Jika tingkat konsumsi energi rendah, maka masyarakatnya memiliki kemampuan/produktifitas kerja yang juga rendah, apalagi masyarakat yang mata pencahariannya adalah petani. Selain itu juga, tingkat konsumsi energi yang rendah berpengaruh terhadap kesehatan anak, Untuk itu perlu diberikan pengetahuan tentang konsumsi zat gizi kepada masyarakat sehingga masyarakat petani yang ada di daerah ini memiliki ketahanan jasmani yang tangguh untuk berusaha tani, dengan demikian produksi pertanian akan meningkat yang berakibat pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Tingkat konsumsi protein masyarakat pada wilayah kajian cukup baik, namun mengingat daerah-daerah ini juga adalah daerah perikanan, maka tingkat konsumsi protein dapat lebih ditingkatkan melalui konsumsi ikan.

Tabel 1. Tingkat Konsumsi Energi dan Protein

No.	Tingkat Konsumsi Energi (Kal)	Tingkat Konsumsi Protein (g)
1.	72	81.5
2.	98	95
3.	92	85
4.	98	95
5.	76	80
6.	76	92
7.	80	86
	572 : 7 = 84 %	614 : 7 = 87.7 %

Sumber : Analisis Data Primer (Tim Peneliti Fakultas Pertanian)

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pangan dan gizi sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar ibu rumah tangga mempunyai tingkat pengetahuan pangan dan gizi yang rendah sehingga kurang adanya keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak balita, pra sekolah dan anak sekolah. Yang akhirnya berdampak pada status gizi masyarakat khususnya kelompok rawan seperti anak balita dan anak pra sekolah. Kurangnya pelayanan gizi dan kesehatan juga dialami oleh masyarakat pada wilayah kajian, antara lain bantuan makanan pengganti ASI (MP ASI) tidak mencukupi, pelayanan pos yandu di desa-desa yang hanya berlangsung satu bulan satu kali. Hal ini sangat berdampak pada status gizi masyarakat setempat.

Dari hasil analisis ternyata status gizi tidak rendah (baik) pada anak balita dan pra sekolah berkisar antara 65 persen sampai dengan 87 persen, sedangkan status gizi rendah berkisar antara 13 persen sampai dengan 35 persen (Tabel 2), hal ini mengindikasikan bahwa pada wilayah kajian masih terdapat anak yang kurang gizi. Keadaan gizi anak balita di suatu daerah pada saat ini menggambarkan keadaan masyarakat pada waktu yang akan datang.

Tabel 2. Rata-rata Status Gizi Anak Usia 0 – 15 Tahun

No	Status Gizi	
	Tidak Rendah	Rendah
1	71,50%	28,50%
2	70%	30%
3	70%	30%
4	71%	29%
5	87%	13%
6	65%	35%
7	70%	30%

Sumber : Analisis Data Primer (Tim Peneliti Fakultas Pertanian)

Produksi pangan merupakan faktor utama dalam penyediaan pangan rumah tangga. Ketersediaan pangan juga berkaitan dengan ketersediaan pangan di pasar, dan pada dasarnya produksi mencerminkan

kondisi pendapatan masyarakat sehingga produksi pangan diharapkan dapat menyediakan pangan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen serta dilakukan dengan cara yang baik tanpa merusak sumberdaya yang tersedia. Rata-rata produksi pangan di Provinsi Maluku pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-Rata Produksi Tanaman Pangan Tahun 2002-2006

No.	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi Sawah	9.124	29.748
2.	Padi Ladang	1.896	3.838
3.	Jagung	5.671,60	11.324
4.	Kedele	1.103,80	1.200
5.	Kacang Tanah	2.077	1.979
6.	Kacang Hijau	1.045	853
7.	Ubi Kayu	8.885	106.898
8.	Ubi Jalar	1.713	14.046
9.	Sagu	31.360	395.136

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku, 2006.

Tabel 1, memperlihatkan bahwa produksi sumber pangan pokok karbohidrat untuk padi sawah, umbi-umbian serta sagu sebagai pangan spesifik lokal cenderung meningkat dan sangat stabil produksinya. Faktor kestabilan produksi pangan secara langsung maupun tidak langsung sangat berperan menstabilkan ketahanan pangan suatu daerah, dan pangan spesifik lokal telah membuktikan kemampuannya dalam menstabilkan ketahanan pangan daerah dari waktu ke waktu. Fakta menunjukkan bahwa kebutuhan akan karbohidrat sebagai makanan utama pada masa yang akan datang cenderung akan bergeser dimana pangan spesifik lokal menjadi makanan utama sementara beras menjadi makanan kedua. Hal ini sangat perlu diupayakan mengingat beberapa faktor keunggulan pangan spesifik lokal ditinjau dari ketahanan, budidaya, adaptasi dan tingkat teknologi dan biaya produksi yang relatif rendah serta dukungan unsur sosial dan budaya lokal.

Distribusi pangan sebagai salah satu aspek penyaluran pangan dari produsen sampai ke tangan konsumen. Distribusi pangan sangat tergantung pada sarana dan prasarana transportasi. Jika transportasi lancar maka, distribusi pangan dapat sampai ke konsumen dalam waktu yang cepat tanpa ada hambatan. Namun jika transportasi tidak lancar maka distribusi pangan akan menjadi terhambat. Biasanya masyarakat yang hidup di daerah perkotaan, akses pangan lebih mudah dan dapat dimiliki dalam jumlah yang banyak. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah-daerah terpencil, akses pangan sangat sulit, karena distribusi pangan menjadi terhambat akibat sarana dan prasarana transportasi yang tidak memadai.

Salah satu syarat pembangunan pertanian adalah transportasi. Tanpa transportasi yang efisien dan murah maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan dengan baik. Perlu jaringan transportasi yang lebih luas untuk membawa sarana dan prasarana produksi, hasil pertanian sampai ke konsumen. Jika transportasi lancar, mudah dan murah maka akan merangsang petani untuk lebih aktif berusaha dan mendistribusikan hasil pertanian sampai ke konsumen akhir.

Pendistribusian pangan khususnya beras masih terpusat pada daerah kota, kabupaten dan kecamatan. Namun desa-desa yang terpencil terkadang kesulitan untuk mendapatkan pangan beras secara kontinue. Kelangkaan beras sering didapati di daerah pedesaan terutama bila pasokan antar pulau terlambat. Sementara pendistribusian pangan spesifik lokal menjangkau kota, kabupaten dan kecamatan dan desa-desa secara merata. Sistem produksi merata di seluruh pedesaan dan pemasaran lokal antar desa dalam kecamatan, antar kabupaten dan antar kota berlangsung secara kontinue tanpa mengenal musim dan waktu baik melalui petani langsung maupun pedagang. Harga pangan spesifik lokal juga selalu stabil, berbeda dengan harga beras yang selalu mengalami kenaikan. Rata-rata harga pangan spesifik lokal berkisar antara Rp. 3.000-5.000/kg, sementara harga beras mencapai Rp. 5.000-7.500/kg yang lebih mahal dari harga pangan spesifik lokal.

Pola pendistribusian pangan spesifik lokal tidak tergantung transportasi dan infra struktur modern karena daya tahan proses produksi tanpa ketergantungan saprodi pendukung seperti pestisida dan pupuk kimia. Hal ini sangat berarti sekali bagi upaya pengembangan komoditi ini kedepan terutama bagi sistem pertanian organik yang menjadi issue pokok bagi pertanian modern pada masa sekarang dan akan datang. Pengkajian untuk itu sudah sangat perlu dimana pangan spesifik lokal mampu menjadi pionir sistem pertanian organik yang menguntungkan (Saragih dan Vokames, 2003).

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penganeekaragaman pangan adalah tertanamnya citra bahwa pangan lokal, sumber karbohidrat seperti singkong, ubi jalar, jagung dan sagu mempunyai nilai yang rendah atau inferior di mata masyarakat. Hanya penduduk miskin dan rawan pangan saja yang merupakan konsumen dari pangan lokal tersebut. Untuk mengatasi hal ini, maka pendekatan penganeekaragaman pangan harus didekati melalui : 1) program penganeekaragaman pangan tidak dikaitkan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan atau untuk mengatasi kerawanan pangan, agar citra pangan sumber karbohidrat non beras yang melekat selama ini sebagai pangan inferior secara perlahan dapat dihapus; 2) program penganeekaragaman pangan seyogyanya digambarkan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan pola konsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi dan berimbang. Dengan demikian aspek kesehatan dan perbaikan gizi lebih ditonjolkan; 3) mengingat beras masih dominan sebagai pangan pokok, upaya penganeekaragaman pangan perlu dikaitkan dengan sasaran penurunan konsumsi beras perkapita yang saat ini masih sangat tinggi; dan 4) karena pendekatannya pada keseimbangan konsumsi gizi, maka perhatian yang cukup perlu diberikan pada pengembangan pangan sumber-sumber protein dan sumber-sumber zat gizi mikro (Sinulingga, 2003).

Penganeekaragaman pangan pada intinya adalah upaya untuk merubah perilaku kebiasaan pangan. Perlu disadari bahwa proses perubahan tersebut akan berjalan lamban. Untuk itu, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang perlu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan: 1) sosialisasi, promosi, dan publikasi tentang penganeekaragaman pangan kepada seluruh *stakeholder*; 2) pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk yang menunjang penganeekaragaman pangan; dan 3) pendidikan bagi anak-anak usia dini (TK, SD) tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang serta pengenalan atas bahan pangan dan makanan yang berasal dari sumberdaya dan budaya spesifik lokasi.

Berbagai jenis pangan lokal sebenarnya mempunyai peluang cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut dalam industri pangan skala kecil, menengah dan besar. Dalam situasi dimana harga bahan baku impor untuk berbagai komoditi seperti terigu, beras, kacang-kacangan dan sebagainya meningkat sebagai akibat melemahnya nilai rupiah, maka peranan produk pangan lokal sebagai pengganti komoditas import menjadi terbuka lebar.

Di kepulauan Maluku umumnya produk-produk lokal seperti sagu, ubi, gembili, ubi kayu, ubi jalar, keladi/talas, pisang dan sebagainya mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai makanan pokok pengganti beras seperti papeda, sagu lempeng, sagu ubi kayu, ubi rebus, keladi rebus, dan ubi jalar rebus serta produk lainnya yang selama ini diolah secara tradisional seperti kripik singkong, kripik keladi, kripik ubi jalar, kripik pisang. Namun demikian kebutuhan yang besar dari industri pangan akan bahan baku pangan lokal baik bahan mentah maupun bahan setengah jadi selama ini tidak dapat terpenuhi karena ketiadaan suplai (produksi) yang mampu memenuhi kriteria mutu dan kesinambungan. Dari segi gizi, semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi berarti semakin tinggi peluang tercukupinya semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita untuk menunjang dan mempertahankan kesehatan. Dari segi ekonomi, mengurangi konsumsi beras dan menggantikannya dengan komoditas pangan lokal berarti penghematan devisa. Hal ini mengisyaratkan bahwa pangan spesifik lokal mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk tujuan ekonomi maupun konsumsi. Untuk tujuan ekonomi, pangan

lokal dapat dipasarkan baik dalam bentuk mentah, maupun olahan. Untuk tujuan konsumsi, pengembangan pangan lokal diarahkan pada pengembangan diversifikasi. Dari sudut gizi, misalnya sagu, ubi, gembili, ubi kayu, ubi jalar, talas/keladi, pisang dan sebagainya mempunyai fungsi yang sama besar yaitu sebagai penghasil karbohidrat/sumber tenaga (Nussy, 2003).

Ketersediaan pangan banyak atau sedikit di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Setiap keluarga memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan pangan untuk dimakan bagi kelangsungan hidup setiap hari. Pangan dihasilkan melalui berbagai cara sesuai keputusan yang dibuat oleh kepala keluarga sebagai manajer atau sesuai mata pencaharian yang digeluti. Petani, nelayan maupun mata pencaharian lainnya memiliki cara-cara tersendiri untuk menghasilkan pangan.

Sebagian besar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sangat tergantung pada produksi pertanian dimana sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama, ternyata lebih tahan jika dibandingkan dengan daerah yang mata pencaharian penduduknya bervariasi, tidak didominasi oleh sektor pertanian. Keadaan ini terutama dipengaruhi oleh ketersediaan pangan dalam rumah tangga, dimana daerah dengan mata pencaharian penduduk utamanya di sektor pertanian, hampir setiap rumah tangga memiliki persediaan pangan untuk jangka waktu tertentu. Pembeliannya sangat tergantung pada ketersediaan uang tunai dan bukan tergantung waktu tanam tanaman pangan.

Ketahanan pangan yang difokuskan pada makna “kemampuan anggota rumah tangga mengakses pangan sampai ke mulut”. Hal ini merupakan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan, dari mana dia memperoleh pangan untuk mempertahankan hidup, diolah menjadi jenis pangan-pangan apa saja dan siapa-siapa saja yang mengkonsumsi? Ini merupakan persoalan mendasar bagi masyarakat tentang ketahanan pangan.

Masalah mendasar bagi masyarakat untuk mengakses pangan sangat tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Kebanyakan masyarakat di kepulauan Maluku terutama di daerah-daerah pedesaan terpencil sangat dihipit oleh masalah pangan dan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur kondisi kemiskinan digunakan beberapa indikator yaitu:

1) pengeluaran untuk konsumsi makanan, dimana jika petani memiliki pendapatan rendah maka untuk mengonsumsi makanan yang cukup gizi akan rendah dalam hal ini berkaitan dengan tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pengadaan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya. Pengeluaran untuk konsumsi makanan berhubungan dengan perbedaan harga bahan makanan yang dikonsumsi. Jika harga kebutuhan bahan pangan tinggi, maka masyarakat akan kesulitan untuk membeli. Hal ini mendorong perlu adanya kebijakan untuk kestabilan harga sehingga membantu masyarakat dalam pengadaan berbagai bahan kebutuhan pokok untuk konsumsi rumah tangga;

2) kepemilikan/penguasaan lahan pertanian, dimana petani yang memiliki lahan luas tetapi kinerja rendah untuk berusaha tani maka hasil yang diperoleh tidak optimal untuk pemenuhan segala kebutuhan hidup rumah tangganya. Sedangkan petani yang memiliki lahan sempit dan kinerja usahatani tinggi untuk pengelolaan lahan, tetapi hasil panen yang diperoleh lebih sedikit sehingga hanya diperuntukkan untuk konsumsi keluarga tanpa dijual untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

Kemiskinan sebagai penyebab gizi kurang menduduki posisi pertama pada kondisi yang umum. Hal ini mendapat perhatian serius, karena keadaan ekonomi yang relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan. Golongan miskin menggunakan bagian terbesar dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan, dimana untuk keluarga-keluarga di daerah pedesaan. Yang perlu dipahami adalah gizi yang baik akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja seseorang sehingga merupakan unsur yang berperan dalam peningkatan kondisi ekonomi keluarga.

Pendapatan rumah tangga masih merupakan suatu ukuran yang kasar karena rumah tangga merupakan satuan-satuan yang heterogen. Heterogenitas tersebut dapat dilihat dari perbedaan jumlah anggota rumah tangga dan perbedaan komposisi menurut umur. Oleh karena itu tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dievaluasi berdasarkan rata-rata pendapatan bagi tiap anggota rumah tangga, sekalipun informasi ini belum memperhitungkan komposisi rumah tangga menurut umur dan jenis kelamin.

Kebijakan nasional dalam hal harga komoditi pangan dapat merangsang peningkatan produksi pangan. Kenaikan produksi pangan dapat pula tidak memberikan hasil pada peningkatan status gizi penduduk karena masih belum seimbang dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Dengan meningkatnya pendapatan seseorang, terjadilah perubahan-perubahan dalam susunan makanan. Akan tetapi, pengeluaran uang yang lebih besar untuk pangan tidak menjamin lebih beragamnya konsumsi pangan. Kadang-kadang, perubahan utama yang terjadi dalam kebiasaan makanan adalah pangan yang dimakan lebih mahal. Akan tetapi, karena bukti menunjukkan bahwa kebiasaan makan cenderung berubah bersamaan dengan naiknya pendapatan, maka masa pertumbuhan pendapatan merupakan saat yang baik untuk mempromosikan diversifikasi pangan.

PENUTUP

Pembangunan ketahanan pangan disesuaikan dengan potensi produksi dan keragaman sumber hayati lokal, kemampuan kelembagaan dan aspirasi sosial budaya masyarakat setempat dan harus dikaitkan dengan peningkatan produksi pangan dalam negeri dan peningkatan pendapatan masyarakat tani.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan objek dan sekaligus sebagai subjek pembangunan, dirasakan semakin penting dalam era globalisasi dewasa ini. Pangan dan gizi merupakan salah satu faktor yang terkait erat dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pangan dengan mutu gizi seimbang lebih mampu berkiprah dalam pembangunan.

Pengembangan tanaman pangan lokal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, dengan strategi pengembangan manajemen penanganan produksi, distribusi pangan dan manajemen penanganan intensifikasi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, S., 2002. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Makalah Rapat Kerja Nasional Forum Wacana Indonesia. Kampus IPB, 9 Oktober 2002.
- Krisnamurthi, B., 2003. Agenda Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel - Th. II - No. 7 - Oktober 2003. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_19/artikel_3.htm)
- Nussy, A. 2003. Pengembangan Pangan Spesifik Lokal dan Prospek Pengembangan di Kabupaten Yapen Maropen. Prosiding Lokakarya Nasional : Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal Papua. Jayapura, 2 – 4 Desember 2003. Kerjasama Universitas Negeri Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.
- Saragih, R. A dan J. Vokames, 2003. Pangan Spesifik Lokal Sebagai Basis Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Jayapura. Prosiding Lokakarya Nasional : Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal Papua. Jayapura, 2 – 4 Desember 2003. Kerjasama Universitas Negeri Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.
- Sinulingga, N. M. 2003. Kebijakan Penganeekaragaman Pangan Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan. Prosiding Lokakarya Nasional : Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal Papua. Jayapura, 2-4 Desember. Kerjasama Universitas Negeri Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.
- Thaha, A.R., 2007. Besaran dan Kecenderungan Masalah Gizi Kawan Timur Indonesia (1989-2005). Makalah Semiloka Penguatan Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia dengan Fokus Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Makasar 28-29 Juli 2007.
- Tim Fakultas Pertanian. 2007. Kajian Khusus Masalah Rawan Pangan dan Kekeringan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.
- Timisela, N.R., 2005. *Analisis Industri Rumahtangga Pangan (IRTP) Sagu di Desa Ihmahu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hal : 2
- Uluputty, M.R. 2006. Sagu Sebagai Alternatif Pangan Nasional. Prosiding Lokakarya : Sagu Dalam Revitalisasi Pertanian Maluku, 29-31 Mei 2006. Kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dengan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Ambon.